

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi politik secara umum adalah komunikasi dan interaksi yang dilakukan yang didalamnya mengandung pesan-pesan politik, komunikasi politik dapat dilakukan oleh siapapun seperti, individu, profesional, organisasi dan terutama partai politik dalam rangka menyampaikan pesan-pesan politik, dalam hal proses komunikasi politik yang formal penyaluran aspirasi politik warga negara yang paling efektif adalah melalui partai politik.

Komunikasi politik tidak hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan politik secara umum, Komunikasi politik apabila diperdalam secara lebih detail dan lebih jelas, maka akan ada hubungan langsung dengan proses interaksi komunikasi dalam rangka melakukan perubahan dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan perubahan ekosistem yang ada di masyarakat, proses komunikasi itu bisa dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, Partai politik, pemerintah. Dalam menjalankan sebuah komunikasi di perlukan adanya komunikator politik agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif, komunikator yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan, anggota legislatif, presiden, menteri, gubernur, bupati atau walikota, serta kelompok lainya yang mampu melakukan tindakan dalam rangka membuat ekosistem yang baik untuk melakukan komunikasi politik yang baik dan ideal menuju ekosistem masyarakat yang diharapkan.

Ilmuwan melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan yang ideal dalam pembangunan politik. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki sesuatu yang istimewa, komunikasi politik meletakkan basis untuk

menganalisis masalah yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan suatu sistem politik yang ada dimasyarakat.

Siapun yang berada dalam sebuah skenario politik bisa disebut sebagai komunikator politik. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Oleh karenanya komunikator politik ini akan dititik tekankan kepada para pemimpin dalam proses politik yang sedang dijalankan.

Dalam membangun interaksi komunikasi politik maka yang berperan penting terhadap saluran komunikasi politik yaitu komunikator itu sendiri. dimana komunikator politik dapat berfungsi sebagai sumber, namun pada waktu yang lain berfungsi sebagai saluran atau media atau pada waktu yang lain bisa berfungsi sebagai keduanya.

Kegandaan fungsi komunikator ini bukanlah sesuatu yang aneh karena fungsi suatu pihak dalam berlangsungnya proses komunikasi memang tergantung darimana kita melihatnya. Birokrasi misalnya, disatu pihak merupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah, namun pada kesempatan lain ia juga dapat berfungsi saluran bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat. Fungsi yang ganda ini terutama ditemui pada unsur-unsur yang bersifat organisasional seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Saluran komunikasi politik mencakup segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Adapun saluran komunikasi tersebut adalah saluran komunikasi massa, saluran komunikasi

interpersonal dan saluran komunikasi organisasi.

Organisasi kemasyarakatan atau biasa disebut dengan ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat dalam rangka untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Adanya keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (*civil society*).

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Ormas: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;

5. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
6. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

- A. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- B. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- C. penyalur aspirasi masyarakat;
- D. pemberdayaan masyarakat;
- E. pemenuhan pelayanan sosial;
- F. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- G. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Organisasi Kemasyarakatan Agama
2. Organisasi Kemasyarakatan Adat dan Budaya
3. Organisasi Kemasyarakatan Nasional

Akar sejarah organisasi masyarakat di Indonesia, bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa colonial. Organisasi

kemasyarakatan atau *civil society* merupakan cikal bakal dari terjadinya kesadaran kolektif masyarakat Indonesia melalui gerakan pemuda pada waktu itu, untuk melakukan gerakan menuju gerbang kemerdekaan, salah satu organisasi masyarakat yang pertama didirikan yaitu organisasi Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, disinilah titik awal peran *civil society* atau organisasi kemasyarakatan menjadi gerakan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk menyatukan kekuatan dan keyakinan serta tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan asing, sehingga akhirnya kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 dapat tercapai.

Paska kemerdekaan (tahun 1950-an), pertumbuhan *civil society* di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer. Namun setelah itu, *civil society* tersebut segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif yang mengakibatkan menghalangi kelanjutan perkembangan *civil society*. Kondisi *civil society* mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Soekarno di mana dominasi penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik dan menguatnya kecenderungan ideologisasi politik yang mempertajam polarisasi politik sehingga kohesi sosial menjadi rapuh. Pada masa Orde Baru, terjadilah perubahan-perubahan *civil society* di Indonesia, akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan struktur sosial masyarakat

Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris. Pada wilayah politik, Orde Baru melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini berakibat pada merosotnya kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998, menjadi titik awal dibukanya keran demokrasi dimana proses kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi cermin utama dalam tumbuhnya ruang komunikasi politik yang lebih terbuka di masyarakat, sehingga peran civil society melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat sehingga banyak sekali tumbuh dan berkembang organisasi kemasyarakatan sebagai wujud dari aspirasi masyarakat dalam rangka menyuarkan keinginan dan harapan terhadap persoalan yang ada, peraturan-peraturan pun dibuat untuk mengatur dan mengawal gerak organisasi masyarakat, aturan yang makin ketat dan spesifik diharapkan dapat mengawal kegiatan dan program organisasi masyarakat berjalan sesuai aturan. Dengan begitu, esensi organisasi masyarakat dapat tercapai yakni untuk mendorong dan membantu percepatan pembangunan bangsa dan negara.

Angkatan Muda Siliwangi adalah organisasi masyarakat yang didirikan sejak Tanggal 10 November 1966 di Bandung bertepatan dengan hari pahlawan, Sejarah terbentuknya Angkatan Muda Siliwangi yaitu Ketika terjadinya pemberontakan G-30-S/ PKI (Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia) situasi dan kondisi Republik Indonesia mengalami

kegentingan serta tidak menentu, di Bandung komponen dari Mahasiswa dan Pemuda berkumpul membahas pembentukan wadah kekuatan rakyat Jawa Barat, kesadaran dan kecintaan terhadap *lemah cai* (tanah air) yang disertai dengan kewaspadaan dan kesiagaan terhadap berbagai ancaman yang timbul dari dalam maupun luar di Negara Republik Indonesia pasca pemberontakan, membuat Para pemuda dan mahasiswa di Jawa Barat dengan tegas menyatakan kesetiiaannya untuk mengawal Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, UUD RI 1945 sebagai Konstitusi Negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka membangun komitmen tersebut para perwakilan pemuda dan mahasiswa berkomunikasi dengan Petinggi Tentara keamanan yang ada di Jawa Barat yaitu Kodam Siliwangi maka dibentuklah Angkatan Muda Siliwangi sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat Jawa Barat.

Para Pemuda dan mahasiswa berkomitmen merapatkan barisan dalam rangka, Pengokohan Angkatan Muda Siliwangi sebagai Pelopor dan komponen vital perjuangan bangsa, Pembentukan Kader inti Siliwangi sebagai warga kader nasional yang berwatak, berotak serta hormat bertanggung jawab kepada rakyat, yang didalam segala bidang kehidupan merupakan unsur hidup peremaja, penggairah dan pemersatu, Pembinaan wilayah Siliwangi dalam rangka nasional se- nusantara Indonesia. Secara umum tujuan berdirinya Angkatan Muda Siliwangi yaitu mewujudkan cita-cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai organisasi masyarakat yang yang memegang teguh semangat

sumpah pemuda 1928 mulai menapakan gerakan sejak didirikan, dibuktikan dengan dikeluarkannya surat pertama organisasi pada tanggal 20 November 1966 yang ditandatangani oleh ketua Umum PP AMS Pertama yaitu R Tjetje Hidayat Padmadinata yang isi suratnya di tujukan kepada sekber Golkar yang menyatakan Angkatan Muda Siliwangi bergabung dengan Sekber Golkar dalam rangka menjadi bagian kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai sarana menjalankan aspirasi masyarakat Sunda, semenjak surat itu dikeluarkan Angkatan Muda Siliwangi resmi menjadi bagian Sekber Golkar dan menjadi Lokomotif Perjuangan Golkar di Jawa Barat dari Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997 yang dikenal dengan istilah Orde Baru, semenjak orde baru berjalan para pemimpin Angkatan Muda Siliwangi dalam gerakan politiknya dalam setiap momentum pemilu dilaksanakan dipastikan memegang jabatan Anggota legislatif disetiap daerah masing-masing, bukan hanya proses pemilu saja berbagai aktifitas politik di era orde baru yang berada di Jawa Barat Angkatan Muda Siliwangi Menjadi penentu dimulai dari pemilihan kepala desa sampai penentuan jabatan Politik di Jawa Barat baik itu pemilihan bupati maupun gubernur Angkatan Muda Siliwangi dengan restu Kodam III Siliwangi menjadi penentu kebijakan politik di Jawa Barat.

Era Reformasi yang terjadi pada Tahun 1998 yang membuat kekuasaan orde baru runtuh secara politik merubah ruang gerak Angkatan Muda Siliwangi, Angkatan Muda Siliwangi yang sejak awal pendiriannya berkomitmen menjaga persatuan, akhirnya harus mengambil sikap untuk mengikuti keinginan aktivis mahasiswa dan pemuda yang pada waktu itu ingin mengadakan perubahan dengan menjalankan agenda reformasi dengan ditandai lengsernya Presiden Soeharto, dengan melihat situasi Politik seperti itu

Angkatan Muda Siliwangi pada kongres yang dilaksanakan di Kuningan pada tahun 1998 menyatakan keluar dari Golkar dan menjadi organisasi masyarakat yang independen dimana kader Angkatan Muda Siliwangi dibebaskan untuk mengambil jalur politik sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, semenjak itulah dimulai pada Pemilu 1999 Angkatan Muda Siliwangi disetiap momentum politik pemilu, semua kader Angkatan Muda aktif di berbagai Partai Politik yang ada tidak satu warna lagi seperti yang terjadi pada saat orde baru.

Di usia yang sudah menginjak 57 tahun sejak pendiriannya, Angkatan Muda Siliwangi masih tetap eksis dan komitmen dalam menjalankan organisasi sesuai cita-cita pendirian.

Sebagai organisasi masyarakat tertua di Jawa Barat, Angkatan Muda Siliwangi sangat memiliki peranan penting dalam proses politik terlebih proses politik yang berhubungan dengan perubahan kekuasaan hal ini tidak terlepas dari sejarah pendiriannya, dengan jenjang kepengurusan dari tingkat pusat sampai tingkat desa kelurahan yang ada di Jawa Barat dan dengan jumlah anggota yang sudah hampir 1 Juta yang tersebar diberbagai wilayah khususnya Jawa Barat tentunya akan cukup berpengaruh apabila dalam proses politik terlibat aktif apalagi dalam menghadapi proses politik di tahun 2024 yang sedang dihadapi. Dengan keberadaan kader dan anggota yang begitu banyak tentunya akan menimbulkan berbagai macam opini dan persepsi dalam menghadapi momentum politik 2024 apabila dibiarkan,

Sebuah organisasi apabila disatukan dalam sebuah tujuan dan cita-cita bersama akan menjadi nilai politik yang baik dan strategis apabila dikelola dengan baik, apalagi Angkatan Muda Siliwangi yang dianggap oleh pelaku

politik di Indonesia khususnya Jawa Barat dianggap mempunyai nilai tawar yang tinggi apabila dilihat dari kiprah dan perjalanan organisasinya. keberpihakan organisasi seperti Angkatan Muda Siliwangi dalam menghadapi proses politik yang sedang di hadapi akan menjadi strategis apabila dikemas dengan baik dengan mengedepankan kebersamaan. Namun proses dinamika untuk mencapai suatu keputusan bersama ini memanglah tidak mudah. Maka dalam hal ini diperlukan proses komunikasi politik Angkatan Muda Siliwangi agar mendapatkan suatu keputusan yang bisa disepakati bersama.

Angkatan Muda Siliwangi yang kader dan kepengurusan organisasinya sudah tersebar di berbagai partai Politik sejak 1999 setelah menyatakan indeviden (tidak dalam satu warna) tentunya saat ini berbaur dengan budaya partai politiknya masing-masing walaupun nilai-nilai perjuangan organisasi Angkatan Muda Siliwangi tidak akan luntur dari arah perjuangan kader yang aktif di partai politik yang berbeda satu samalainnya, bukti bahwa Kader Angkatan Muda Siliwangi sudah berwarna dalam balutan partai politik bisa dilihat dari para pemimpin organisasi Angkatan Muda Siliwangi di masing-masing daerah , contoh : Ketua Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Ciamis saudara Didi Sukardi, SE, yang merupakan Anggota DPRD Jawa Barat dari PKS berbeda dengan tetangganya ketua Angkatan Muda Siliwangi Kota Banjar, Kusnadi,ST yang merupakan Kader Partai Golkar, dan masih banyak lagi daerah yang lain yang warna partainya berbeda tetapi masih dalam satu organisasi Angkatan Muda Siliwangi. Berbagai macam latar belakang partai politik inilah yang menjadi tantangan pimpinan Angkatan Muda Siliwangi untuk menyatukan kekuatan organisasi ditengah latar belakang partai yang berbeda bisa menjadi nilai tawar strategis dalam dukungan kepada calon

presiden dan wakil presiden di pemilu 2024.

Pada momentum Politik 2024 dalam hal sikap politik Angkatan Muda Siliwangi pada tanggal 5 Mei 2023 dalam proses rapat pimpinan pusat sebagai bagian mekanisme organisasi yang dilaksanakan di Bandung memutuskan secara resmi untuk mendukung Calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden 2024, keputusan ini mutlak disepakati oleh seluruh pimpinan Angkatan Muda Siliwangi dari perwakilan daerah yang hadir walaupun mereka yang hadir secara latar belakang partai politik yang berbeda-beda tetapi dalam satu warna organisasi Angkatan Muda Siliwangi.

Berangkat dari temuan dan fenomena yang ada di Angkatan Muda Siliwangi peneliti tertarik untuk mengungkap suatu permasalahan dan mencari jawabannya dengan judul **“Strategi Komunikasi Politik Organisasi Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Presiden 2024 : Studi Kasus di Angkatan Muda Siliwangi”**. Dengan begitu peneliti berharap Penelitian ini menjadi penting dan bermakna karena dapat memberikan informasi atau wawasan terhadap masyarakat khususnya Anggota Angkatan Muda Siliwangi untuk bisa membawa nilai dan citra organisasi yang baik dan bisa menjaga mengharumkan nama organisasi dimata masyarakat dalam menjaga komitmen dan kesetiaan terhadap sebuah keputusan yang diambil demi menjaga citra organisasi dimata Fublik.

1.2 Rumusan Masalah

Komunikasi politik dapat dilakukan oleh profesional, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, wartawan, unit keluarga, individu, terutama partai politik. Penyaluran aspirasi politik warga negara yang paling efektif adalah melalui partai politik.

Angkatan Muda Siliwangi yang merupakan organisasi yang berbasis di Jawa Barat tentunya memiliki peranan penting dalam menghadapi kontestasi politik di pemilu presiden 2024 ini. Dengan memiliki anggota yang jumlahnya mencapai 1 Juta lebih, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan keputusan yang sama. Berdasarkan hal tersebut maka diambil sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Organisasi Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Presiden 2024 : Studi Kasus di Angkatan Muda Siliwangi?

1.3 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti rangkum pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut?

1. Apa komunikasi politik yang dilakukan oleh Angkatan Muda Siliwangi untuk mengambil keputusan politik?
2. Mengapa mengambil keputusan politik mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2024?
3. Bagaimana cara melaksanakan keputusan politik Angkatan Muda Siliwangi?
4. Bagaimana cara menjalankan strategi politik Angkatan Muda Siliwangi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Maka tujuan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk komunikasi politik yang dilakukan oleh Angkatan Muda Siliwangi untuk mengambil keputusan politik
2. Untuk mengetahui mengapa mengambil keputusan politik mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2024?

3. Untuk mengetahui cara melaksanakan keputusan politik Angkatan Muda Siliwangi.
4. Untuk mengetahui cara menjalankan strategi politik Angkatan Muda Siliwangi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, dapat memperkaya dan melengkapi khazanah Ilmu Komunikasi, khususnya tentang kajian persepsi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membandingkan dan juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti mengenai komunikasi politik juga menerapkan teori – teori yang didapat serta melatih kemampuan berpikir secara sistematis.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai komunikasi politik di organisasi kemasyarakatan.

c. Bagi Anggota Angkatan Muda Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

kepada Anggota Angkatan Muda Siliwangi agar kedepannya lebih siap lagi ketika ada momentum politik yang memang Angkatan Muda Siliwangi harus terlibat.

1.6 Sistematika Penelitian

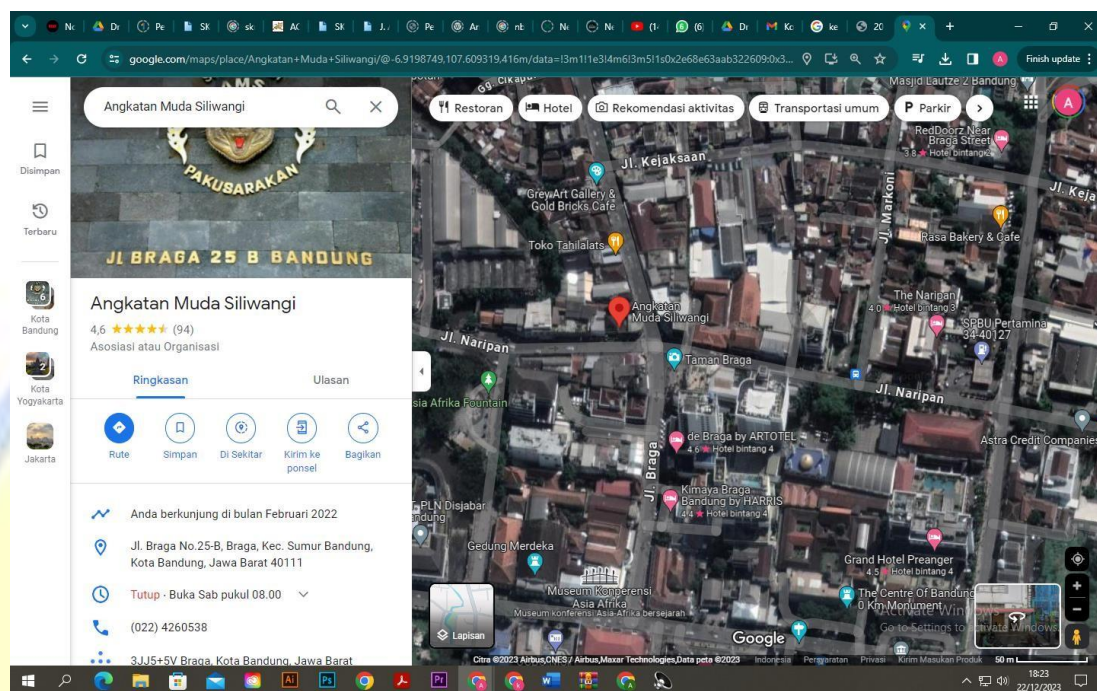
Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian skripsi, lokasi dan waktu penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari rangkuman teori, kajian atau penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN, teori dari pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahn data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan rekomendasi

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Angkatan Muda Siliwangi yang beralamat Kantor di Jl. Braga 25b Bandung. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan fenomena – fenomena yang tertera pada latar belakang penelitian, disamping itu yang menjadi lokasi penelitian ini juga merupakan tempat menimba ilmu peneliti. Hal ini merupakan bentuk kepedullian peneliti terhadap kampus tempat menimba ilmu peneliti, sebelum akhirnya peneliti melakukan

penelitian ditempat yang lebih luas.



Gambar 1.1
Peta Wilayah Angkutan Muda Siliwangi
Sumber : Google Maps

Penelitian dilaksanakan terhitung dari mulai bulan September 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 1.1
Rincian Waktu Penelitian

Sumber : data diolah oleh peneliti

Bulan ke-	Aktivitas	Sub Aktivitas	Minggu Ke-				
			1	2	3	4	
1	Tahap Persiapan Penelitian	Observasi	■				
		Identifikasi Masalah	■				
		Pengajuan Judul Penelitian	■				
		Acc Judul Penelitian		■			
		Pengarahan Pembimbing			■		
		Penyusunan BAB I			■		
	Penyusunan Usulan Penelitian	Revisi BAB I	■				
		Acc BAB I		■			
		Pengajuan izin penelitian			■		
		Penyusunan BAB II	■	■			
		Revisi BAB II			■		
		ACC BAB II			■		
		Penyusunan BAB III			■		
		Revisi BAB III			■		
		Acc BAB III				■	
3	Sidang UP	Persiapan Sidang Usulan Penelitian	■				
		Sidang Usulan Penelitian		■			
	Penyusunan Skripsi	Observasi dan Wawancara			■		
		Pengumpulan Data Penelitian			■		
		Penyusunan BAB IV		■		■	
		Revisi BAB IV			■	■	
		Acc BAB IV				■	
		Penyusunan BAB V				■	
		Revisi BAB V				■	
		Acc BAB V				■	
	4	Sidang Skripsi	Persiapan Sidang Akhir	■			
			Sidang Akhir		■		